

**AKSIOMA SOSIAL, ATRIBUSI PENYEBAB KEMISKINAN DAN  
SIKAP TERHADAP KEBIJAKAN REDISTRIBUSI****Yuni Nurhamida**Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang  
y\_nurhamida@yahoo.com

Studi ini meneliti hubungan antara aksioma sosial, atribusi penyebab kemiskinan, dan sikap terhadap kebijakan redistribusi. Aksioma sosial sebagai keyakinan umum diduga dapat menjadi prediktor bagi keyakinan yang lebih spesifik, yaitu atribusi penyebab kemiskinan, dan jenis kebijakan redistribusi yang didukung. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui dimensi aksioma sosial yang dapat menjadi prediktor bagi atribusi penyebab kemiskinan dan sikap terhadap kebijakan redistribusi. Sebanyak seratus tiga belas orang dari masyarakat umum menjadi subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan dimensi aksioma sosial yang dapat menjadi prediktor bagi sikap terhadap kebijakan redistribusi *merit* adalah imbalan terhadap usaha, sedangkan prediktor bagi sikap terhadap kebijakan redistribusi *equality* adalah religiusitas. Sedangkan dimensi aksioma sosial yang dapat menjadi prediktor bagi atribusi internal adalah sinisme sosial, imbalan terhadap usaha, kekuasaan takdir dan prediktor bagi atribusi eksternal adalah religiusitas.

Kata kunci: Aksioma Sosial, Atribusi Penyebab Kemiskinan, Sikap Terhadap Kebijakan Redistribusi

*This study aimed to examine the correlation between social axioms, causal attribution about poverty and attitude toward redistribution policy. Social axioms as a general belief generate more specific belief, in this research is causal attribution about poverty, and correlate to the attitude toward redistribution policy. This study use survey method to one hundred and thirteen people from society. The results showed the dimensions of social axioms that can be a predictor for attitudes towards redistribution policies merit is the reward for application, while the predictor for attitudes towards redistribution equality policies are religiosity. The dimensions of social axioms that can be a predictor for the internal attribution is social cynicism, reward for application, faith control and predictors for external attribution is religiosity.*

*Keywords: Social Axioms, Causal Attribution About Poverty, Attitude Toward Redistribution Policy*

Salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang penting dan tak kunjung selesai adalah masalah kemiskinan. Penduduk Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta atau 14,15 % (BPS, 2009). Begitu pentingnya masalah kemiskinan, sehingga Rencana Kebijakan Pemerintah (RKP) tahun 2009 mengambil tema “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”. Dalam RKP tahun 2009, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 31 juta jiwa (14 %). Pada masa pemerintahan periode 2004-2009 juga telah dilaksanakan sejumlah kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan, misalnya dengan memberikan bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga kurang mampu melalui Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Selain itu, terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri (PNPM Mandiri) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (<http://www.setneg.go.id>).

Penentuan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan seringkali menimbulkan sikap yang mendukung maupun menolak. Misalnya saja kebijakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada rumah tangga miskin sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM yang ditetapkan pada tahun 2005. Kebijakan tersebut merupakan bentuk kebijakan yang baru, karena sebelumnya pemerintah lebih banyak menggunakan metode subsidi barang (misalnya subsidi harga BBM) dan pemberian kredit kepada kelompok yang kurang beruntung.

Pada penelitian ini, kebijakan redistribusi akan diterjemahkan dalam berbagai contoh kebijakan yang menggunakan prinsip keadilan *merit* atau *equity* dan *equality*. Prinsip *merit* mengacu pada adanya perbedaan kontribusi sosial yang harus dihargai, yang mengarah pada alokasi redistribusi masing-masing, sesuai dengan prinsip kelayakan untuk menerima (Miller, 1976). Taylor dan Moghaddam (Tyler, Boeckman, Smith, & Huo, 1997) menyatakan bahwa kontribusi dapat berupa usaha yang telah dilakukan orang untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya, dalam hal ini usaha untuk keluar dari kemiskinan. Sedangkan prinsip *equality* adalah pembagian yang sama untuk semua (Deutsch, 1985) yang dalam konteks alokasi redistribusi adalah pembagian yang sama untuk semua berdasarkan keanggotaan kelompok (Taylor & Moghaddam dalam Tyler dkk, 1997), dalam hal ini keanggotaan kelompok miskin.

Sejumlah penelitian psikologi menunjukkan beberapa hal yang berpengaruh pada sikap terhadap kebijakan redistribusi. Studi Appelbaum (2001) menunjukkan, jika penerima dipersepsikan layak menerima, orang yang memegang ideologi liberal cenderung memberikan rekomendasi dibanding mereka yang berideologi politik konservatif. Sedangkan hasil penelitian Wakslak, Jost, Tyler, dan Chen (2007) menunjukkan, dukungan terhadap kebijakan redistribusi dipengaruhi oleh Ideologi Pembetulan Sistem (*System Justification Ideology*). Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh studi Appelbaum, Lennon, dan Aber (2006) yang menunjukkan bahwa keyakinan dunia adalah tempat yang adil (*Belief in a Just World*) berpengaruh pada sikap terhadap kebijakan antikemiskinan.

Prediktor sikap terhadap kebijakan redistribusi yang lain menggunakan pendekatan atribusi. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif antara atribusi penyebab kemiskinan eksternal (misalnya perlakuan diskriminatif yang diterima) dengan persepsi tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar

(misalnya perawatan kesehatan yang adekuat untuk orang miskin). Sebaliknya, ada hubungan negatif antara atribusi penyebab kemiskinan internal (misalnya: kemalasan) dengan persepsi terhadap tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar (Shirazi & Biel, 2005).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa beberapa konstruk keyakinan yang terkait politik (*BJW*, *System Justification*, dan ideologi) telah terbukti berhubungan dengan sikap terhadap kebijakan redistribusi. Konstruk keyakinan lain yang bersifat umum, yang tidak terkait langsung dengan politik belum banyak diteliti hubungannya dengan sikap terhadap kebijakan redistribusi. Keyakinan umum dapat menjadi pedoman bagi pemegangnya untuk menyikapi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk masalah kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan keyakinan umum, yaitu aksioma sosial sebagai prediktor dalam penelitian ini.

Aksioma sosial adalah konsep baru yang dikemukakan oleh Leung, Bond, Reimel de Carrasquel, Muñoz, Hernández, Murakami, Yamaguchi, Bierbrauer, dan Singelis (2002). Aksioma sosial sebagai keyakinan umum tentang manusia, kelompok sosial, institusi sosial, lingkungan fisik, atau dunia spiritual termasuk tentang kategori peristiwa dan fenomena dalam dunia sosial (Leung & Bond, 2008). Meskipun pada awalnya aksioma sosial dimaksudkan sebagai pelengkap konstruk nilai dalam studi lintas budaya, namun pada akhirnya aksioma sosial terbukti juga menyediakan *framework* umum untuk menginterpretasi lingkup yang luas lebih dari perilaku individual, interpersonal, dan sosial (Bond, 2009). Aksioma sosial terdiri dari lima dimensi yaitu : sinisme sosial, kompleksitas sosial, imbalan atas usaha, dan religiusitas.

Leung dan Bond (2004) mengajukan pemikiran bahwa keyakinan pada ranah tertentu yang relevan dalam hidup kita melekat secara hirarkis dengan aksioma sosial. Sehingga peneliti menduga hubungan antara aksioma sosial dan sikap terhadap kebijakan redistribusi dimediasi oleh keyakinan yang lebih spesifik terkait kemiskinan, dalam hal ini oleh atribusi penyebab kemiskinan. Penelitian Shirazi dan Biel (2005) yang menunjukkan bahwa atribusi internal dan eksternal merupakan mediator hubungan antara ideologi dan pandangan tanggungjawab negara untuk menyediakan kebutuhan dasar. Secara teoritik peran atribusi sebagai mediator ini juga mengacu pada pendapat Thibaut dan Riecken's (Kelley & Michela, 1980).

Dalam menghadapi isu kemiskinan, berdasarkan definisi dan hasil penelitian sebelumnya, hanya dua dimensi dari aksioma sosial, yaitu imbalan atas usaha dan religiusitas yang dapat diprediksikan hubungannya dengan penelitian ini. Hui dan Hui (2009) menyatakan bahwa dari hasil-hasil penelitian tentang imbalan atas usaha, nampak bahwa motif mendasar dari imbalan atas usaha adalah keyakinan terhadap prinsip *equity* (merit). Sehingga peneliti menduga imbalan atas usaha berkorelasi positif dengan kebijakan redistribusi *merit* yang dimediasi oleh atribusi penyebab kemiskinan internal.

Dimensi aksioma sosial selanjutnya yang dapat diprediksikan hubungannya dengan sikap terhadap kebijakan redistribusi adalah religiusitas. Penelitian Liem, Hidayat, dan Soemarno (2009) menunjukkan religiusitas berkorelasi positif dengan sikap dan intensi terhadap donasi. Demikian juga Hui dan Hui (2009) yang menyatakan bahwa religiusitas adalah kekuatan baik manusia, sehingga peneliti menduga religiusitas berkorelasi positif dengan sikap terhadap kebijakan redistribusi. Korelasi positif ini

menunjukkan orang yang memiliki skor religiusitas yang tinggi akan mendukung kebijakan redistribusi. Namun demikian, penjelasan konseptual dan hasil penelitian tersebut belum dapat dijadikan pijakan untuk merumuskan hipotesa tentang variabel mediator dan jenis kebijakan redistribusi yang didukung oleh orang yang memiliki religiusitas yang tinggi.

Ketiga dimensi aksioma sosial yang lain, yaitu sinisme sosial, kompleksitas sosial, dan kekuasaan takdir juga belum dapat diprediksikan hubungannya dengan atribusi penyebab kemiskinan dan sikap terhadap kebijakan redistribusi. Sehubungan dengan itu, maka peneliti melaksanakan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum merumuskan hipotesa.

### **Sikap Terhadap Kebijakan Redistribusi**

Dalam penelitian tentang sikap, definisi sikap sangat beragam, dan memiliki penekanan yang berbeda-beda. Penekanan pada aspek evaluatif dikemukakan oleh Eagly dan Chaiken (1993) yang mendefinisikan sikap sebagai suatu kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan penilaian terhadap entitas tertentu dengan beberapa tingkatan kesetujuan atau ketidaksetujuan. Hal yang sama juga nampak dari pendapat Oskamp dan Schultz (2005) yang mendefinisikan sikap sebagai suatu kecenderungan untuk merespon dengan cara *favorable* maupun *unfavorable* terhadap objek sikap tertentu. Dalam penelitian ini sikap merupakan kecenderungan untuk merespon dalam beberapa tingkatan setuju dan tidak setuju terhadap objek sikap, yaitu kebijakan redistribusi.

Fleischacker (2004) menyatakan bahwa "*distributive justice*" dalam konteks modern adalah pembahasan tentang jaminan negara bahwa kepemilikan didistribusikan pada seluruh masyarakat sedemikian rupa sehingga semua orang dipasok dengan tingkat kekayaan tertentu dari kebutuhan. Jika pada kenyataannya, distribusi kekayaan dalam masyarakat timpang, maka negara harus melaksanakan redistribusi untuk mengurangi ketimpangan melalui sejumlah kebijakan redistribusi. Alesina (2004) menyatakan bahwa redistribusi dapat terjadi jika belanja pemerintah digunakan untuk menyokong orang miskin dan kelompok yang tidak diuntungkan (misalnya : perawatan kesehatan, subsidi untuk pengangguran, bantuan untuk keluarga berpenghasilan rendah, orang yang cacat, dsb) dengan menjalankan pajak progresif untuk mengumpulkan pendapatan pemerintah, serta peraturan perburuhan dan peraturan pasar yang baik.

Spicker, dkk (2007) menyebutkan bahwa redistribusi mencakup pengalihan sumber daya dari beberapa orang kepada orang lain. Redistribusi yang melibatkan pengalihan sumber daya yang melibatkan orang kaya dan orang miskin disebut sebagai vertikal, sedangkan redistribusi yang mengalihkan sumber daya antar kelompok, misalnya dari orang yang tidak memiliki anak kepada orang yang memiliki anak disebut sebagai redistribusi horisontal. Redistribusi vertikal yang menguntungkan orang miskin, yaitu pengalihan sumber daya dari orang kaya ke orang miskin disebut sebagai progresif.

Dalam konteks pembahasan ketimpangan kekayaan antara kaya dan miskin, sebagaimana dalam penelitian ini, istilah kebijakan redistribusi mengacu pada kebijakan yang bertujuan untuk mengalihkan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin (Alesina & Glaeser, 2004; Busemeyer dkk, 2009).

### **Prinsip Keadilan yang digunakan dalam Kebijakan Redistribusi**

Prinsip keadilan yang digunakan dalam kebijakan redistribusi adalah bagian dari bahasan tentang siapa yang layak menerima dan bagaimana redistribusi akan dilakukan. Terkait kebijakan redistribusi, prinsip keadilan yang digunakan akan melahirkan program yang berbeda. Misalnya, prinsip *equality* melahirkan kebijakan yang memberikan sumber daya berdasarkan keanggotaan dalam kelompok, dalam hal ini semua orang yang memenuhi kriteria miskin akan mendapatkannya, misalnya asuransi kesehatan dan suplai bahan makanan pokok. Prinsip *equity* atau *merit* memberikan sumber daya berdasarkan kontribusi dari orang miskin terhadap kehidupan masyarakat, misalnya berbentuk usaha yang telah dilakukannya untuk keluar dari kemiskinan agar tidak menjadi beban masyarakat.

### **Atribusi Terhadap Kemiskinan**

Studi tentang atribusi penyebab kemiskinan berusaha mengeksplorasi atribusi penyebab kemiskinan, perbedaan atribusi penyebab kemiskinan jika ditinjau dari aspek demografis, serta anteseden dan konsekuen dari atribusi terhadap kemiskinan. Feagin (1972) mengemukakan 3 kategori atribusi penyebab kemiskinan, yaitu atribusi internal yang menerangkan kemiskinan sebagai masalah orang miskin itu sendiri, seperti kurangnya kemampuan, usaha, atau kegigihan. Kategori yang kedua adalah atribusi struktural, yang memandang kemiskinan disebabkan oleh faktor dari luar individu (perlakuan diskriminatif berdasarkan ras, suku, jenis kelamin, kegagalan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, eksploitasi dari kapitalis, dsb). Kategori yang lain adalah penyebab takdir (nasib) atau fatalistik, misalnya cacat, sakit, ketidakberuntungan, yang menunjukkan bahwa orang miskin tidak memiliki kontrol terhadap kemiskinannya. Hine dan Montiel (1999) dalam penelitiannya menemukan bahwa atribusi penyebab kemiskinan meliputi eksploitasi, kelemahan karakter yang menyebabkan menjadi miskin, adanya konflik, dan pemerintahan yang lemah.

Anteseden dari atribusi kemiskinan yang telah diteliti adalah ideologi. Hasil penelitian Zucker dan Weiner (1993) menunjukkan konservatisme berkorelasi positif dengan keyakinan tentang penyebab kemiskinan individualistik, kemampuan untuk mengontrol, perasaan menyalahkan dan marah, dan berkorelasi negatif dengan persepsi pentingnya penyebab sosial, rasa kasihan dan intensi untuk menolong orang miskin. Peran atribusi kemiskinan sebagai mediator diteliti oleh Shirazi dan Biel (2005) yang hasilnya menunjukkan atribusi kemiskinan merupakan mediator pengaruh gender dan ideologi politik terhadap sikap pada aturan kesejahteraan sosial. Penelitian ini juga menguji apakah perbedaan budaya memperkuat pengaruh atribusi penyebab kemiskinan terhadap sikap pada aturan kesejahteraan sosial. Hasil analisa data dari 14 budaya menunjukkan hubungan yang positif antara pentingnya penyebab kemiskinan eksternal dengan dukungan terhadap kebijakan sosial tentang kebutuhan dasar dan korelasi negatif antara penyebab internal dan dukungan terhadap kebijakan sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa orang yang ideologi politiknya konservatif, jika dibandingkan dengan liberal, terutama laki-laki, kurang mempersepsi negara bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan. Perbedaan pengaruh ideologi terhadap persepsi tanggungjawab negara tersebut dimediasi oleh atribusi internal dan eksternal, sedangkan perbedaan gender dimediasi oleh atribusi eksternal. Demikian juga pengaruh budaya pada dukungan terhadap kebijakan sosial, juga dimediasi oleh atribusi penyebab.

### **Aksioma Sosial**

Aksioma sosial adalah keyakinan umum tentang seseorang, lingkungan fisik dan sosial, atau dunia spiritual, dalam bentuk pernyataan tentang hubungan antar dua entitas atau lebih. Sesuai dengan definisi tersebut, aksioma sosial memiliki struktur: A berhubungan dengan B. A dan B dapat merupakan entitas apapun, dan hubungannya dapat berupa korelasi atau sebab-akibat. Persepsi terhadap kekuatan hubungan tersebut dapat berbeda-beda pada tiap individu. Misalnya, "hal yang baik akan terjadi pada orang baik" adalah contoh dari aksioma sosial dan orang akan menunjukkan keyakinan dalam tingkatan yang berbeda terkait pernyataan tersebut (Leung dkk, 2002). Leung dan Bond (2002) menamakan keyakinan tersebut sebagai aksioma sosial, dengan pemikiran, bahwa sebagaimana aksioma dalam matematika, keyakinan ini merupakan premis dasar yang ditunjukkan dan digunakan orang untuk memandu perilaku dalam situasi yang berbeda-beda. Keyakinan ini bersifat aksioma karena seringkali diasumsikan benar berdasarkan pengalaman pesonal dan proses sosialisasi, bukan hasil dari validasi ilmiah.

Eksplorasi dengan menggunakan faktor analisis menghasilkan struktur 5 faktor yang dapat diaplikasikan terhadap kedua budaya tersebut. Untuk mengonfirmasi universalitas yang lebih luas terhadap struktur ini, Leung dkk (2002) mendapatkan data dari 3 budaya yang lain-USA, Jepang, dan Jerman. Model lima faktor ini juga mendapatkan dukungan dari ketiga budaya tersebut. Didorong oleh hasil awal tersebut, Leung dan Bond (2004) melakukan sebuah proyek global dengan melibatkan lebih dari 50 pihak yang berkolaborasi dari 40 bangsa/kelompok budaya. Hasil CFA penelitian ini kembali menguatkan bahwa struktur 5 faktor tersebut merupakan bentuk faktor yang paling optimal. Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sinisme Sosial : pandangan yang negatif terhadap manusia, bias terhadap beberapa kelompok sosial, ketidakpercayaan terhadap institusi sosial, dan keyakinan bahwa manusia cenderung untuk mengabaikan etika dalam mengejar tujuannya.
2. Kompleksitas sosial, keyakinan bahwa terdapat beragam cara untuk menyelesaikan masalah, dan bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku yang bersifat terberi, dapat berbeda dalam lintas situasi yang berbeda.
3. Imbalan atas usaha, suatu keyakinan bahwa investasi usaha, pengetahuan, perencanaan yang cermat, dan sumber daya yang lain akan mengarahkan pada hasil yang positif.
4. Spiritualitas, namun selanjutnya disebut sebagai religiusitas, karena mencakup tidak hanya keyakinan terhadap kekuatan supernatural, namun juga sejumlah keyakinan tentang fungsi manfaat sosial dari institusi dan praktek agama.
5. Kekuasaan takdir, keyakinan bahwa peristiwa yang terjadi dalam hidup telah ditentukan sebelumnya oleh berbagai kekuatan eksternal, namun terdapat cara bagi manusia untuk mempengaruhi dampak negatif dari kekuatan-kekuatan tersebut.

Kelima faktor tersebut pada akhirnya juga terkonfirmasi dengan menggunakan *multilevel factor analysis*, yang merupakan teknik analisa yang lebih kuat (Cheung, Leung, & Au, 2006).

## **METODE PENELITIAN**

### **Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah penduduk Indonesia yang memiliki pendidikan minimal SMA karena kompleksitas alat ukur membutuhkan pemahaman yang baik. Metode sampling yang digunakan adalah *accidental sampling*. Pemilihan subyek dan teknik sampling karena penelitian ini terkait dengan kebijakan yang melibatkan masyarakat umum. Pada studi 1 subyek berjumlah 113. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 46,9% (53 orang) adalah laki-laki dan 53,1% (60 orang) perempuan. Usia subjek paling muda 18 tahun dan paling tua 59 tahun, dengan rata-rata usia adalah 33,53 tahun. Jika ditinjau dari pengalaman menerima bantuan pemerintah, sebanyak 85,8% (97 orang) tidak pernah menerima bantuan, sedangkan 14,2% (16 orang) pernah menerima bantuan dari pemerintah. Sedangkan pada studi 2 dari 300 skala yang disebar, 245 kuesioner kembali. Namun hanya 219 kuesioner yang diikutsertakan dalam analisis karena 26 skala pengisiannya tidak lengkap. Sebanyak 132 (60,3%) subjek adalah laki-laki, dan 87 (39,7%) adalah perempuan; 182 (83,1%) beragama Islam, dan 37 beragama Nasrani (16,9%); 105 (47,9%) adalah lulusan SMA dan 114 (52,1%) adalah sarjana. Usia minimum 18 tahun dan maksimum 49 tahun dengan mean 27,7 tahun. Terkait dengan bantuan pemerintah, sebanyak 36 orang (16,4%) adalah penerima bantuan dana dan sisanya tidak pernah menerima bantuan dana dari pemerintah.

**Metode Pengumpulan Data**

*Social Axioms Survey (SAS, Leung & Bond, 2004)*. Jumlah item untuk mengukur dari 5 dimensi aksioma sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah 39 item, yang meliputi: Sinisme sosial (11 item), kompleksitas sosial (6 item), imbalan terhadap usaha (9 item), religiusitas (7 item), dan kekuasaan takdir (6 item). Skala ini menggunakan 4 rentang pilihan, yaitu Sangat Yakin, Yakin, Tidak Yakin, Sangat Tidak Yakin. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. Reliabilitas diuji dengan menggunakan *alpha cronbach*. Validitas dan reliabilitas item pada skala aksioma sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

**Tabel 1. Validitas dan reliabilitas skala aksioma sosial**

Dimensi	Total item	Jumlah item gugur	Jumlah item terpakai	Validitas item (Factor Loading)	Reliabilitas ( $\alpha$ )
Sinisme sosial	11	4	7	0,31-0,68	0,6489
Kompleksitas sosial	6	3	3	0,15-0,27	0,3699
Imbalan atas usaha	9	-	9	0,30-0,69	0,7178
Religiusitas	7	-	7	0,31-0,69	0,7607
Kekuasaan takdir	6	3	3	0,35-0,77	0,5367
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>32</b>		

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dimensi yang paling lemah reliabilitasnya adalah kompleksitas sosial sehingga dimensi ini tidak dapat diikutsertakan dalam analisa selanjutnya.

Skala atribusi penyebab kemiskinan disusun oleh peneliti berdasarkan skala penelitian Shek (2003) dan Shirazi dan Biel (2005). Skala berjumlah 13 item, yang meliputi: penyebab kemiskinan eksternal (8 item) dan penyebab kemiskinan internal (5 item) Skala ini menggunakan 4 rentang pilihan, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Validitas item atribusi internal berkisar antara 0,4680-0,6857 dengan nilai reliabilitas dengan *alpha cronbach* 0,8196. Sedangkan validitas atribusi

eksternal antara 0,3506-06827 dengan nilai  $\alpha = 0,7734$ . Skala sikap terhadap kebijakan redistribusi diukur dengan Skala sikap yang disusun oleh peneliti. Skala terdiri dari 14 item, yaitu kebijakan redistribusi yang menggunakan prinsip *merit* (9 item), dan kebijakan redistribusi yang menggunakan prinsip *equality* (5 item). Skala menggunakan skala *Likert* dengan 4 pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Validitas item bergerak antara 0,3817-0,5671 dan reliabilitas *alpha cronbach* sebesar 0,6541 untuk kebijakan *Equality*. Sedangkan untuk kebijakan *merit* validitas berkisar antara 0,3076-0,5120 dengan nilai *alpha* 0,6005.

**Prosedur dan Metode Analisa Data Penelitian**

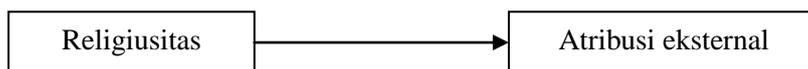
Pada awalnya peneliti melakukan survei di tempat-tempat umum seperti masjid, mall, taman kota, dan stasiun kereta api untuk mendapatkan subjek yang beragam. Namun demikian, ternyata penulis sulit untuk mendapatkan orang yang bersedia menjadi subjek penelitian, akhirnya penulis meminta bantuan pada beberapa orang yang menjadi kontak peneliti untuk menyebarkan kepada orang-orang yang dikenalnya yang memenuhi syarat sebagai subjek penelitian. Penulis memberikan penjelasan kepada para kontak tentang prosedur pengisian skala. Pengambilan data untuk studi satu dilakukan pada tanggal 13-26 April 2010. Sedangkan studi dua dilakukan pada tanggal 10 -25 Mei 2010. Adapun metode analisa datanya menggunakan uji regresi.

**HASIL PENELITIAN**

**Uji Regresi**

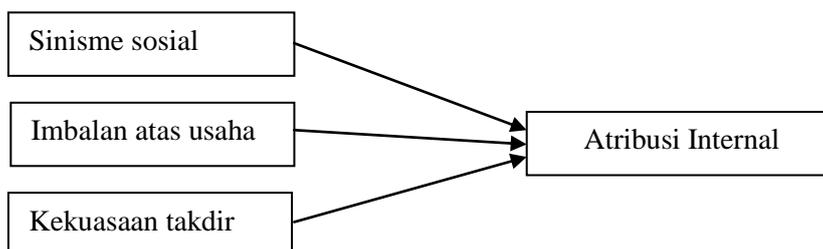
Peneliti melakukan uji regresi untuk melihat dimensi aksioma sosial yang dapat menjadi prediktor bagi atribusi penyebab kemiskinan maupun sikap terhadap kebijakan redistribusi. Hasil selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Regresi aksioma sosial dengan atribusi eksternal, menunjukkan, hanya dimensi religiusitas yang dapat menjadi prediktor bagi atribusi eksternal.



**Gambar 1. Religiusitas sebagai prediktor atribusi eksternal**

- b. Regresi aksioma sosial dengan atribusi internal menunjukkan dimensi *social cynicism*, *reward for application*, dan *fate control* merupakan prediktor yang signifikan untuk atribusi internal.



**Gambar 2. Sinisme sosial, imbalan atas usaha, dan kekuasaan takdir sebagai prediktor atribusi internal**

- c. Regresi Sikap terhadap kebijakan redistribusi *equality* dengan aksioma sosial menunjukkan hanya dimensi religiusitas merupakan prediktor sikap terhadap kebijakan yang menggunakan prinsip *equality*.



**Gambar 3. Religiusitas sebagai prediktor sikap terhadap kebijakan redistribusi *equality***

- d. Regresi Sikap terhadap kebijakan redistribusi *merit* dan aksioma sosial menunjukkan hanya imbalan atas usaha yang merupakan prediktor yang signifikan untuk sikap redistribusi dengan prinsip *merit*.



**Gambar 4. Imbalan atas usaha sebagai prediktor sikap terhadap kebijakan redistribusi *merit***

Sedangkan koefisien regresi dan taraf signifikansi dari hasil analisa regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2 Hasil Analisa Regresi Aksioma Sosial , Atribusi Penyebab Kemiskinan, dan Sikap terhadap Kebijakan Redistribusi**

	Koefisien regresi	P	R <sup>2</sup>
AS-eksternal:			
Religiusitas-eksternal	0.205	0.04	0.037
AS-internal			
Sinisme sosial	0.210	0.036	
Imbalan terhadap usaha	0.118	0.001	0.176
Kekuasaan takdir	-0.281	0.003	
AS- Merit			
Imbalan terhadap usaha	0.133	0.029	0.079
AS-Equality			
religiusitas	0.135	0.019	0.049

Keterangan : AS : Aksioma sosial

Berdasarkan hasil tersebut, dimensi aksioma sosial yang dapat menjadi prediktor bagi sikap terhadap kebijakan redistribusi *merit* adalah imbalan terhadap usaha. Sedangkan dimensi aksioma sosial yang dapat menjadi prediktor untuk sikap terhadap kebijakan redistribusi *equality* adalah religiusitas. Demikian juga untuk prediktor atribusi penyebab kemiskinan eksternal adalah religiusitas.

**DISKUSI**

Hasil penelitian menunjukkan, hanya dimensi religiusitas dan imbalan atas usaha yang dapat menjadi prediktor bagi atribusi internal dan eksternal. Demikian juga hanya kedua dimensi tersebut yang dapat menjadi prediktor bagi sikap terhadap kebijakan redistribusi yang menggunakan prinsip *merit* dan *equality*. Dimensi kekuasaan takdir dan kompleksitas sosial tidak menjadi prediktor baik bagi atribusi maupun sikap terhadap kebijakan redistribusi. Hal tersebut mungkin dipengaruhi oleh rendahnya validitas dan reliabilitas dari kedua dimensi tersebut sehingga dalam penelitian ini kedua aspek tersebut tidak memadai untuk diuji secara statistik. Secara teoritik, rendahnya validitas dan reliabilitas mungkin disebabkan oleh ambiguitas konsep kekuasaan takdir. Bond (2009) mengakui konsep kekuasaan takdir nampak ambigu karena percaya pada keberadaan kekuatan yang telah menetapkan sebelum kejadian terjadi, namun pada saat yang bersamaan memiliki keyakinan bahwa apa yang telah ditentukan tersebut ada yang dapat diubah. Dia berpandangan bahwa kekuasaan takdir tidak hanya dikontrol oleh takdir, namun kontrol takdir tersebut terjadi melalui tindakan. Bahwa takdir seseorang dapat dinegosiasikan.

Sedangkan rendahnya validitas dan reliabilitas dari dimensi kompleksitas sosial dalam penelitian ini selaras dengan hasil penelitian aksioma sosial di Indonesia yang dilakukan oleh Liem dkk (2007). Pada penelitian Liem dkk (2007) dengan subjek mahasiswa Indonesia, semua indikator dari dimensi kompleksitas sosial tidak valid karena nilai *factor loading* < 0.3 dan reliabilitas dengan *alpha cronbach* juga rendah ( $\alpha = 0.35$ ). Bond (2009) menyatakan perlu studi lintas budaya yang lebih luas untuk menguji aksioma sosial, terutama kekuasaan takdir dan kompleksitas sosial. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa keyakinan terkait dengan budaya. Sehingga Bond (2009) mengajukan solusi untuk menambahkan item yang bersifat lokal sesuai dengan budaya setempat.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa sinisme sosial dapat menjadi prediktor bagi atribusi penyebab kemiskinan internal. Sinisme sosial sebenarnya adalah sindrom keyakinan yang merupakan potret negatif manusia, khususnya tentang kekuasaan yang bersifat merusak. Kurangnya kepercayaan terhadap otoritas dan institusi sosial, dan keyakinan bahwa orang lain tidak akan menggunakan cara yang etis dalam meraih tujuannya. Pandangan yang negatif terhadap dunia sosial ini diduga akan membuat orang sinis cenderung untuk melakukan *self absorption* dan kurang peduli terhadap kemanusiaan (Leung & Bond, 2004). Hasil studi ini yang menunjukkan orang sinis menganggap kemiskinan disebabkan oleh predisposisi internal mendukung pandangan Leung dan Bond (2004) bahwa orang sinis kurang peduli terhadap kemanusiaan, dalam hal ini kurang peduli terhadap masalah sosial, yaitu kemiskinan. Sebagian besar subjek penelitian (85.8%) yang merupakan orang yang tidak pernah menerima bantuan mungkin juga menganggap orang miskin sebagai ancaman atau tipu muslihat orang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut sinisme sosial dan atribusi penyebab kemiskinan pada penerima bantuan pemerintah.

## SIMPULAN DAN IMPLIKASI

### Simpulan

Dimensi aksioma sosial yang dapat menjadi prediktor bagi sikap terhadap kebijakan redistribusi *merit* adalah imbalan terhadap usaha, sedangkan prediktor bagi sikap terhadap kebijakan redistribusi *equality* adalah religiusitas. Sedangkan dimensi aksioma

sosial yang dapat menjadi prediktor bagi atribusi internal adalah *sinisme* sosial, imbalan terhadap usaha, dan kekuasaan takdir dan prediktor bagi atribusi eksternal adalah religiusitas.

### Implikasi

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif sehingga membuka banyak topik penelitian baru. Rendahnya validitas dan reliabilitas dari dimensi aksioma sosial, yaitu kompleksitas sosial dan kekuasaan takdir menantang untuk dipecahkan dengan merumuskan item-item baru yang mempertimbangkan budaya di Indonesia. Penelitian ini juga dapat dilanjutkan dengan menggunakan variabel atribusi penyebab kemiskinan sebagai mediator hubungan antara aksioma sosial dengan sikap terhadap kebijakan redistribusi *merit* dan *equality*. Selain itu, penelitian tentang kemiskinan yang masih minim di Indonesia juga memungkinkan untuk dieksplorasi konsep psikologis lain yang terkait kemiskinan.

### REFERENSI

- Appelbaum, L.D. (2001). The Influence of perceived deservingness on policy decisions regarding aid to the poor. *Political Psychology*, 22,(3), 21-24
- Appelbaum, L.D., Lennon, M.L., Aber, J.L. (2006). When effort is threatening: The influence of the belief in a just world on Americans' attitudes toward antipoverty policy. *Political Psychology*, 27,(3), 8-10
- Bond, M.H. (2009). Believing in beliefs: a scientific but personal quest. Dalam Leung, & Bond, (Eds). (2009). *Psychological aspects of social axioms: Understanding global belief systems, International and cultural psychology series*. New York: Springer.
- Deutsch, M. (1985). Distributive justice. *A social psychological perspective*. London : Yale University Press.
- Hine, D.W., & Montiel, C. J. (1999). Poverty in developing nations: A cross-cultural attributional analysis. *European Journal of Social Psychology*, 29, 943-959.
- Hui, C. M. & Hui. H. (2009). The mileage from social axioms: learning from the past and looking forward. Dalam Leung & Bond, (Eds), (2009). *Psychological aspects of social axioms: Understanding global belief systems, International and cultural psychology series*. New York: Springer.
- Kelley, H.H.& Michela, J. L. (1980). Attribution theory and research. *Annual. Review. Psychology*, 31, 457-501.
- Liem, A. D., Hidayat S., & Soemarno, S. (2009). Do general beliefs predict specific behavioral intentions in indonesia? the role of social axioms within the theory of planned behavior Dalam Leung & Bond, (Eds). (2009). *Psychological aspects of social axioms: Understanding global belief systems, International and cultural psychology series*. New York: Springer.

- Leung, K., Bond, M. H., Reimel de Carrasquel, S., Muñoz, C., Hernández, M., Murakami, F., Yamaguchi, S., Bierbrauer, G., & Singelis, T. M. (2002). Social axioms: The search for universal dimensions of general beliefs about how the world functions. *Journal of cross-cultural psychology, 33*, 286–302.
- Leung, K., & Bond, M. H. (2004). Social axioms: A model for social beliefs in multi-cultural perspective. *Advances in Experimental Social Psychology, 36*, 119–197.
- Miller, D. (1976). *Social Justice*. Clarendon Press, Oxford.
- Shek, D. T. L. (2003). Chinese people's explanations of poverty: the perceived causes of poverty scale. *Research on Social Work Practice, 13*, 622.
- Shirazi, R., dan Biel, A.. (2005). Internal-external causal attributions and perceived goverment responsibility for need provision. a 14 culture study. *Journal of Cross Cultural Psychology, 35*, 96.
- Tyler, T, Boeckman, Smith, Huo. (1997). *Social justice in a diverse society*. Perseus Books Group: New York.
- Wakslak, C.J., Jost, J.T., Tyler, T.R., dan Chen, E. S. (2007). Moral outrage mediates the dampening effect of system justification on support for redistributive social policies. *Psychological Science, 18*.